



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI WAHYUDI SALEH
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 214778

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 12.246.500.000

1. Tanah Seluas 1335 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, WARISAN Rp. 110.400.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
4. Tanah Seluas 672 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
5. Tanah Seluas 242 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
6. Tanah Seluas 868 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 2.635.500.000
7. Tanah Seluas 272 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 355.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/117 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.550.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/248 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 4.545.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 905.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000



2. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INOVA 2,4 DIESEL Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 300.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	400.500.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	490.447.169
F. HARTA LAINNYA	Rp.	47.000.000
Sub Total	Rp.	14.089.947.169
III. HUTANG	Rp.	4.077.647.164
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.012.300.005

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.